

## **Bab II**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Direktorat Jenderal Pajak DIY**

Perjalanan reformasi birokrasi nampaknya tak terasa sudah dimulai sejak tahun 2002 yang dimasini oleh departemen keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lokomotifnya. Tentunya hal ini tidak mengagetkan dengan di mulainya Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi percontohan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan *good governance* mengingat kedudukan Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang sangat strategis.

Kantor wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diresmikan pada tanggal 6 November 2007 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai tindak lanjut dari keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-141/Pj/2007 tanggal 3 Oktober 2007 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan sebagai rangkaian dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai upaya pelaksanaan *good governance* dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Unit kerja yang berada dalam dalam wilayah Kanwil DJP DI Yogyakarta meliputi :

1. KPP Pratama Yogyakarta
2. KPP Pratama Sleman
3. KPP Pratama Bantul
4. KPP Pratama Wonosari
5. KPP Pratama wates

## **B. VISI DAN MISI**

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi  
Menjamin kedaulatan

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menjamin penyelenggaraan Negara yang Berdaulat dan mandiri dengan:

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional; dan
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

## **C. TUGAS DAN FUNGSI**

### **a. Tugas**

Tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja kementerian keungan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan
6. Pelaksanaan adminstrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor pelayan pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).

Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 37.800 orang yang tersebar di seluruh penjuru

nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat.

Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini dapat dibedakan atas;

1. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
2. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah kanwil DJP sebanyak 33 unit.

#### **b. Fungsi**

Dalam menjalin tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak
2. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan
3. Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian bimbingan teknis computer

4. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan
5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian
6. Bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan
7. Bimbingan penyuluhan dan pelayanan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat
8. Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan
9. Bimbingan dan penyelesain pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
10. Pelaksanaan administrasi kantor

#### **D. ORGANISASI DAN WILAYAH KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIY**

##### **a. Gambaran umum**

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 7°.33-8°.12 Lintang selatan dan 110°.00-100°.50 Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 Km<sup>2</sup> atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.860.359,67 km<sup>2</sup>). Wilayah kerja Kantor

Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keseluruhan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (seperti gambar berikut)



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta membawahi 5 KPP Pratama, yaitu:

1. KPP Pratama Yogyakarta, dengan wilayah kerja Kota Yogyakarta
2. KPP Pratama Sleman, dengan wilayah kerja Kabupaten Sleman
3. KPP Pratama Bantul, dengan wilayah kerja Kabupaten Bantul
4. KPP Pratama Wates, dengan wilayah kerja Kabupaten Kulonprogo
5. KPP Pratama Wonosari, dengan wilayah kerja Kabupaten Gunungkidul

#### **b. Pembagian Wilayah Kantor Pelayanan Pajak**

##### **1. KPP Pratama Yogyakarta**

Wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta meliputi seluruh wilayah Kota Yogyakarta yang terdiri dari 14 kecamatan.

Wilayah kerja	Kecamatan	Luas wilayah (dalam km <sup>2</sup> )	
Kota Yogyakarta	Mantirejon	2,61	
	Kraton	1,40	
	Mergangsan	2,31	
	Umbulharjo	8,12	
	Kota Gede	3,07	
	Gondokusuman	3,99	
	Danurejan	1,10	
	Pakualaman	0,63	
	Gondomanan	1,12	
	Ngampilan	0,82	
	Wirobrajan	1,76	
	Gedongtengen	0,96	
	Jetis	1,70	
	Tegalrejo	2,91	
	Jumlah		32,50

## 2. KPP Pratama Sleman

Wilayah kerja KPP Sleman meliputi seluruh wilayah kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kecamatan.

Wilayah Kerja	Kecamatan	Luas wilayah (dalam km <sup>2</sup> )
Kabupaten Sleman	Moyudan	27,62
	Minggir	27,27
	Seyegan	26,63
	Godean	26,84
	Gamping	29,25
	Mlati	28,52
	Depok	35,55
	Berbah	22,99
	Prambanan	41,35
	Kalasan	35,84
	Ngemplak	35,71
	Ngaglik	38,52
	Sleman	31,32
	Tempel	32,49
	Turi	43,09
	Pakem	43,84
	Cangkringan	47,99
Jumlah		506,85

### 3. KPP Pratam Bantul

Wilayah kerja KPP Bantul meliputi seluruh wilayah kabupaten Bantul yang terdiri dari 17 kecamatan.

Wilayah Kerja	Kecamatan	Luas wilayah (dalam km <sup>2</sup> )
Kabupaten Bantul	Srandakan	18,34
	Sanden	23,27
	Kretek	25,50
	Pundong	23,76
	Bambanglipuro	22,82
	Pandak	24,29
	Bantul	21,99
	Jetis	25,60
	Imogiri	57,81
	Dlingo	56,34
	Pleret	21,28
	Piyungan	33,12
	Banguntapan	26,29
	Sewon	26,76
	Kasihlan	32,38
	Pajangan	33,19
	Sedayu	34,11
Jumlah		506,85

### 4. KPP Pratama Wates

Wilayah kerja KPP Wates meliputi seluruh wilayah kabupaten Kolunprogo yang terdiri dari 12 kecamatan.

Wilayah Kerja	Kecamatan	Luas wilayah (dalam km <sup>2</sup> )
Kabupaten Kolunprogo	Temon	36,29
	Wates	32,00
	Panjatan	44,59
	Galur	32,91
	Lendah	35,59
	Sentolo	52,69



	Pengasih	61,67
	Kokap	73,80
	Girimulyo	54,91
	Nanggulan	39,61
	Kalibawang	52,96
	Samigaluh	69,29
Jumlah		586,27

## 5. KPP Pratama Wonosari

Wilayah kerja KPP Wonosari meliputi seluruh wilayah kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari 18 kecamatan.

Wilayah kerja	Kecamatan	Luas wilayah (dalam km <sup>2</sup> )
Kabupaten Gunungkidul	Panggang	99,80
	Purwosari	71,76
	Paliyan	58,07
	Saptosari	87,83
	Tepus	104,91
	Tanjungsari	71,63
	Rongkop	83,46
	Girisubo	94,57
	Semanu	108,39
	Ponjong	104,49
	Karangmojo	104,49
	Wonosari	75,51
	Playen	105,26
	Patuk	72,04
	Gedangsari	68,14
	Nglipar	73,87
	Ngawen	46,59
	Semin	78,92
Jumlah		1.485,36

### c. Karakteristik Wilayah Kerja

Wilayah Kanwil DJP DI Yogyakarta meliputi seluruh wilayah daerah Istimewa Yogyakarta, dengan 1 kota, 4 kabupaten, 78 kecamatan

dan 438 kelurahan/desa. Terdapat 438.982 wajib pajak orang pribadi, 33.568 wajib pajak badan, 5.252 wajib pajak bendahara yang terdaftar (sumber: Masterfile wajib pajak s.d. 31 desember 2015). Potensi ekonomi yang dominan pada tahun 2015 adalah pada sektor perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta keuangan dan asuransi.

### **1. KPP Pratama Yogyakarta**

Wilayah KPP Pratama Yogyakarta meliputi seluruh wilayah kota Yogyakarta, dengan 45 kelurahan/desa. Terdapat 88.631 wajib pajak orang pribadi, 9.745 wajib pajak badan, dan 662 wajib pajak bendahara yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Potensi ekonomi yang dominan pada tahun 2015 adalah sektor keuangan dan asuransi

### **2. KPP Pratama Sleman**

Wilayah KPP Pratama Sleman meliputi seluruh wilayah kabupaten Sleman, dengan 86 kelurahan/desa. Terdapat 160.116 wajib pajak orang pribadi, 12.503 wajib pajak badan, dan 915 wajib pajak bendahara yang terdaftar di KPP Sleman. Potensi ekonomi yang dominan pada tahun 2015 adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib

### **3. KPP Pratama Bantul**

Wilayah KPP Pratama Bantul meliputi seluruh wilayah kabupaten Bantul, dengan 75 kelurahan/desa. Terdapat 100.737

wajib pajak orang pribadi, 6.620 wajib pajak badan, dan 858 wajib pajak bendahara yang terdaftar di KPP Bantul. Potensi ekonomi yang dominan pada tahun 2015 adalah sektor pengolahan.

#### **4. KPP Pratama Wates**

Wilayah KPP Pratama Wates meliputi seluruh wilayah kabupaten Kolunprogo, dengan 88 kelurahan/desa. Terdapat 43.427 wajib pajak orang pribadi, 2.529 wajib pajak badan, dan 782 wajib pajak bendahara yang terdaftar di KPP Wates. Potensi ekonomi yang dominan pada tahun 2015 adalah sektor administrasi pemerintahan.

#### **5. KPP Pratama Wonosari**

Wilayah KPP Pratama Wonosari meliputi seluruh wilayah kabupaten Gunungkidul, dengan 144 kelurahan/desa. Terdapat 46.071 wajib pajak orang pribadi, 2.171 wajib pajak badan, dan 2.035 wajib pajak bendahara yang terdaftar di KPP Wates. Potensi ekonomi yang dominan pada tahun 2015 adalah sektor administrasi pemerintahan.

## **E. STURKTUR ORGANISASI Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY**

Struktur organisasi Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai

berikut:

### 1. Bagian Umum:

- a. Sub bagian kepegawaian
- b. Sub bagian tata usaha dan rumah tangga
- c. Sub bagian keuangan
- d. Sub bagian bantuan hukum dan pelaporan

### 2. Bidang dukungan teknis dan konsultasi, terdiri dari:

- a. Seksi dukungan teknis computer
- b. Seksi data dan potensi
- c. seksi bimbingan pengawasan

### 3. Bidang kerjasama Ekstensifikasi dan Penilaian, terdiri dari:

- a. Seksi bimbingan kerjasama perpajakan
- b. Seksi bimbingan ekstensifikasi perpajakan
- c. Seksi bimbingan pendaftaran

### 4. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak, terdiri dari:

- a. Seksi bimbingan pemeriksaan
- b. Seksi administrasi penyidikan
- c. Seksi bimbingan penagihan
- d. Seksi Intelijen

5. Bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat, terdiri dari:

- a. Seksi bimbingan penyuluhan
- b. Seksi bimbingan pelayanan
- c. Seksi hubungan masyarakat

6. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan, terdiri dari :

- a. Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan I
- b. Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan II
- c. Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan III
- d. Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan IV